



Research Article

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Lumanatul Latifah

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Indonesia; lumanatull@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 23, 2023

Revised : June 24, 2024

Accepted : June 28, 2024

Available online : July 02, 2024

How to Cite : Lumanatul Latifah. (2024). History of Islamic Education in Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(2), 138-153. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i2.94>

History of Islamic Education in Indonesia

Abstract. The history of Islamic education in Indonesia has undergone significant development along with the evolution of the national education system. The first Islamic education in Indonesia usually took place in Islamic boarding schools, which are traditional Islamic schools that focus on teaching the Quran and hadith. These pesantrens became the center for the development and spread of Islam in various parts of Indonesia. After Indonesia's independence in 1945, the Indonesian government committed to creating a national education system that covered all aspects of life. This included Islamic education, which is recognized as one of the majority religions in Indonesia. The government integrated Islamic education into the national education system by giving recognition and support to madrasahs (Islamic schools) as well as developing a curriculum that included aspects of Islam. Renewal in Islamic education thought and religious moderation have become an integral part of Islamic education in Indonesia. This effort aims to ensure that Islamic education not only fulfills religious needs, but also contributes to the formation of citizens who hold moderate views, are tolerant, and open to various religious views. This research uses the historical study method to examine the history of Islamic education in Indonesia. The researcher conducted a historical study of various sources, such as books, journals, educational reports, and documentation.

Keywords: education, Islam, Indonesia

Abstrak. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan evolusi sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam pertama di Indonesia biasanya berlangsung di lingkungan pesantren, yaitu sekolah-sekolah tradisional Islam yang berfokus pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Pesantren ini menjadi pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di berbagai wilayah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan. Ini termasuk pendidikan Islam, yang diakui sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia. Pemerintah mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional dengan memberikan pengakuan dan dukungan kepada madrasah (sekolah Islam) serta pengembangan kurikulum yang mencakup aspek agama Islam. Pembaruan dalam pemikiran pendidikan Islam dan moderasi beragama telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan agama, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berpandangan moderat, toleran, dan terbuka terhadap berbagai pandangan agama. Penelitian ini menggunakan metode studi sejarah untuk meneliti sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Peneliti melakukan studi sejarah terhadap berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, laporan pendidikan, dan dokumentasi

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Indonesia

PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan telah ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, mencerminkan peran penting yang dimainkannya dalam pembentukan identitas keagamaan dan budaya masyarakat Indonesia. Sebelum menjelajahi sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mari kita pahami lebih lanjut konteks luas dari pendidikan Islam di dunia Islam dan bagaimana ia berintegrasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.¹

Pendidikan Islam tiba di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke kepulauan ini. Kontak awal antara pedagang Arab dan penguasa lokal di pulau-pulau Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Pendidikan Islam pertama di Indonesia biasanya berlangsung di lingkungan pesantren, yaitu sekolah-sekolah tradisional Islam yang berfokus pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Pesantren ini menjadi pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di berbagai wilayah Indonesia.²

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan. Ini termasuk pendidikan Islam, yang diakui sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia. Pemerintah mengintegrasikan pendidikan Islam ke

¹ Saputra, Fedry. "Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3.1 (2021): 98-108.

² Fahmi, Fauzi, and Firmansyah Firmansyah. "Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1 (2021): 83-95.

dalam sistem pendidikan nasional dengan memberikan pengakuan dan dukungan kepada madrasah (sekolah Islam) serta pengembangan kurikulum yang mencakup aspek agama Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berkembang mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam tersebut. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.³

PEMBAHASAN

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan islam di indonesia erat hubungannya dengan kedatangan islam ke indonesia. Dalam hal ini Mahmud Yunus mengatakan, bahwa sejarah pendidikan islam sama lamanya dengan masuknya islam ke indonesia. Hal ini dikarenakan pemeluk agama baru tentu ingin mempelajari serta mengetahui lebih mendalam tentang ajaran-ajaran agamanya, sehingga menyebabkan timbulnya proses belajar mengajar, dalam pengertian paling sederhana "Dari sinilah mulai timbulnya pendidikan islam".⁴

Teori masuknya islam di indonesia

a. Teori Mekah

Teori ini berpendapat bahwasannya proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab yang berlangsung pada abad pertama Hijriah bertepatan pada abad ke-7 Masehi, ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, kedatangan awal orang Arab ke Indonesia juga dilandasi oleh dorongan untuk menyebarkan agama Islam, bukan untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi. Teori Makkah mulanya dikemukakan oleh para sejarawan Barat seperti van Leur, Keyzer, TW Arnold, Crawford, Niemann, dan de Hollander, sedangkan tokoh yang memperkenalkan dan gencar menggaungkan teori Makkah ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Buya Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958, saat orasi dalam acara dies natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta, Bahkan buya Hamka berpendapat bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudera Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada masa itu. Kemudian, bukti lain dari teori ini adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudera Pasai. Namun, Teori Arab memiliki kelemahan, yaitu dianggap kurang memiliki sumber

³ Lutfiyana, Izza, Ridwan Ardianto, and Fery Diantoro. "Tinjauan Histori Terhadap Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan* 7.2 (2021): 115-124.

⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 34.

tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia.⁵

Teori Gujarat

Teori ini berpendapat bahwasannya proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat yang berlangsung pada abad ke-7 Hijriah bertepatan dengan abad ke-13 Masehi, Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah sarjana dari Belanda, yaitu J. Pijnapel dari Universitas Leiden pada abad ke 19. Menurut J. Pijnapel, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat sejak awal Hijriah (abad ke 7 Masehi), namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori Pijnapel ini disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, Snouck Hurgronje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan Anak Benua India. Orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgronje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar "sayid" atau "syarif" di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Moquetta yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 H/1297 M di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulanan Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambay, Gujarat. Moquetta akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang di anut masyarakat muslim di Gujarat dan Indonesia. Namun, terdapat kelemahan Teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G.E. Morison, seorang jurnalis asal Australia. Morison mengatakan bahwa, belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu.⁶

Teori Persia

Teori ini berpendapat bahwasannya proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi (kini Iran). Pencetus dari teori ini adalah Hoesein Djajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hoesein menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain: peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syi'ah atas syahidnya Husein,

⁵ Fauziah Nasution, *Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 1 (2020), 32

⁶ Fauziah Nasution, *Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 1 (2020), 32

peringatan ini berbentuk pembuatan bubur Syura. Selain itu, di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husein. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husein untuk dilemparkan ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syaikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hallaj. Bukan kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam (murtad) dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Alasan lain yang dikemukakan Hoesein yang sejalan dengan teori Moquetta, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mahzab Syafi'i, sama seperti kebanyakan muslim di Iran. Namun, Teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam.⁷

Teori Cina

Teori ini berpendapat bahwasannya proses kedatangan Islam ke Indonesia (khususnya di Jawa) berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 M, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al Qurtuby dalam bukunya *Arus Cina-Islam-Jawa* menyatakan, menurut kronik masa Dinasti Tang (618-960) di daerah Kanton, Zhang-zhao, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Kelemahan Teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia.⁸

Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Meminjam istilah Azyumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas; artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan.

Proses berkembangnya Islam di Indonesia ada enam yaitu: perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan politik dan di tambah dengan saluran dakwah menurut referensi lain. Dari saluran di ataslah Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sampai sekarang seperti pengaruh bahasa, nama, adat-istiadat dan pengaruh kesenian. Sebab itu, masuknya Islam di Nusantara tidak merusak

⁷ Fauziah Nasution, *Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 1 (2020), 33

⁸ Fauziah Nasution, *Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 1 (2020), 34

tatanan kebudayaan melainkan mengakomodir yang direkonstruksi formulasinya dalam ajaran Islam.

Pendidikan Islam di Indonesia

Masa kerajaan islam

Berdasarkan pendapat Ibnu Batutah sistem pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan islam, yaitu: (1)Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah Fiqh mazhab Syafii. (2)System pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan halaqah (3)Tokoh pemerintahannya merangkap sebagai tokoh agama. (4)Biaya pendidikan agama bersumber dari kerajaan.⁹

Masa pemerintah Belanda

Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama hampir 2 abad, dari abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20. Selama periode ini, ada beberapa perubahan dalam pendidikan Islam yang mempengaruhi masyarakat Muslim Indonesia. beberapa poin penting mengenai pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda:(1)Penindasan dan Pembatasan: Belanda mencoba untuk mengendalikan pendidikan Islam dengan mengenakan pembatasan pada institusi pendidikan Islam dan ulama. Mereka mengontrol isi pendidikan Islam dan mengurangi pengaruh agama Islam dalam masyarakat. (2)Pendidikan Formal: Selama masa penjajahan, Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi, termasuk sekolah-sekolah Islam. Namun, mereka memiliki kontrol penuh atas kurikulum dan isi pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. (3)Kolonialisme Budaya: Pemerintah kolonial Belanda juga berusaha mempengaruhi budaya dan agama Islam melalui pengaruh kolonialisme budaya. Hal inimenakup upaya untuk mempromosikan agama Kristen dan budaya Barat. (4) Perlawanan dan Perkembangan: Meskipun ada tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Muslim Indonesia tetap mempertahankan pendidikan Islam. Banyak pondok pesantren yang tetap beroperasi, meskipun dalam kondisi yang sulit. Umat Islam juga aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. (5)Pembaruan dan Pemikiran Islam: Selama periode ini, ada gerakan pembaruan Islam yang muncul di kalangan intelektual Muslim Indonesia. Beberapa ulama dan pemikir seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida dari Mesir memengaruhi pemikiran Islam di Indonesia melalui tulisan-tulisan mereka tentang reformasi dan pembaruan Islam. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda di Indonesia merupakan periode yang kompleks, di mana umat Islam di Indonesia berusaha mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama mereka sambil menghadapi tantangan dari pemerintah kolonial.¹⁰

Masa pemerintah Jepang

Pemerintah Jepang memberikan beberapa kebijakan terhadap pendidikan Islam antara lain: (1)Mengubah Kantor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri,

⁹ Hasbullaah, Sejarah Pendidikan Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.29

¹⁰ Fedry Saputra, sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di indonesiaJurnal AL-HIKMAH Vol 3, No 1 (2021), 100

yakni K.H. Hasyim Asy'ari. (2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. (3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin. (4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta. (5) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan (6) Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.¹¹

Pendidikan Pada Masa Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.

Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal Orde Baru), ketentuan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian.¹²

Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Sejak dibubarkan PKI dengan G30S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa "Orde Baru". Diakui bahwa kebijakan pemerintah

¹¹ Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2000), h.151

¹² Fedry Saputra, sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di indonesia Jurnal AL-HIKMAH Vol 3, No 1 (2021), 104

Orde Baru mengenai pendidikan islam dalam konteks madrasah di indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an.

Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.

Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ber budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali.

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya : (1)Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. (2)Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya. (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (4)Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Lahirnya SKB tersebut dijiwai oleh Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya Penyesuaian Sistem Pendidikan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara perbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Sehingga sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah "Kurikulum 1984" untuk

madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. Diantara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategis, diantaranya : (1) Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan. (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya. (3) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

Lahirnya MAPK, Dengan dilator belakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam dimasa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Lebih lanjut dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, PP. No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (disempurkan dengan PP.22/1999). Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum. UU dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

Lahirnya Kurikulum 1994, Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum.¹³

¹³ Direktorat jenderal Pendidikn Islam (KEMENAG RI), sejarah pendidikan islam dan organisasi ditjen pendidikan islam, <https://pendis.kemenag.go.id/>

f. Pendidikan Islam di Zaman Reformasi.

Pada masa reformasi pendidikan Islam lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Adapun kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan pendidikan Islam: (1) Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah Islam seperti MI, MTS, MA, PTAIN, PTAIS. (2) Pemerintah juga membantu meningkatkan pendidikan di pondok pesantren dengan memberikan bimbingan atau kurikulum, memberikan saran pendidikan, meningkatkan subsidi terhadap guru, memberikan teknologi seperti komputer untuk dapat digunakan dalam meningkatkan iptek. (3) Pemeliharaan sekolah dasar sampai perguruan tinggi Islam dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. (4) Memberikan pendidikan agama di sekolah umum terutama pendidikan Islam. (5) Merancang kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan Islam. Menteri agama pun telah mengeluarkan peraturan pendidikan Islam. Sehingga akan menjadi pedoman standar kompetensi yang dicapai oleh para pelajar.¹⁴

Di balik itu semua, dunia pendidikan pada masa reformasi dililit oleh berbagai persoalan, seperti: (1) Menurunnya Pendapatan sehingga memperlemah kemampuan Bersekolah. (2) Penurunan Partisipasi Masyarakat Akibat Kerusuhan. (3) Terlambatnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru.¹⁵

Kondisi pendidikan Islam masa kini ditandai dengan adanya lima kecenderungan, yaitu kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan, kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat, kecenderungan kemajuan teknologi, kecenderungan ketersaling-gantungan, dan kecenderungan munculnya penajahan baru dalam bidang kebudayaan.¹⁶

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Subdit Pondok Pesantren berkembang menjadi direktorat yang bernama Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, sebagai satu dari empat direktorat yang pada Ditjen Kelembagaan Agama Islam. Transformasi layanan kelembagaan dari yang semula berupa unit eselon III (Subdirektorat/Subdit) menjadi unit eselon II (Direktorat) memberikan pengaruh positif terhadap makin berkembangnya layanan melalui berbagai program dan kegiatan untuk menjawab pesatnya perkembangan lembaga Pesantren dan Pendidikan Diniyah.

Pada akhirnya seiring dengan berkembangnya lingkup dan beban layanan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

¹⁴ Afiani AZ, dkk. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia, *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Volume 9 (1) 2021, 102

¹⁵ Yusri M. Daud *Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry* Vol. 10 No.2, Edisi Juli-Desember 2021, 6

¹⁶ Vita Fitriatul Ulya, pendidikan islam di indonesia: problem masa kini dan perspektif masa depan, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, September 2018, 149

berubah pula menjadi Direktorat Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Perubahan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, ketentuan mengenai tugas dan fungsi Direktorat Pesantren dan Pendidikan Diniyah berikut organisasi dibawahnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama merupakan tindak lanjut dari Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, yang menjelaskan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Agama.¹⁷

Pendidikan Islam di tengah sistem pendidikan Nasional

Indonesia secara tegas dinyatakan bukan negara agama dan bukan negara sekuler akan tetapi Indonesia merupakan negara pancasila. Negara pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai pancasila. Pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan yang diatur secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 2003 diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara: Semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Terpadu, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional. Untuk meletakkan kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasi pada tiga hal, yaitu: Pendidikan Islam sebagai lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan keagamaan. (1) Lembaga pendidikan formal, terdiri dari: a. pendidikan usia dini: Raudhatul Athfal (RA). b. Pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) c. Pendidikan menengah; pendidikan formal pada pendidikan menengah berbentuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan

¹⁷Sejarah, direktorat Pendidikan diniyah dan pondok pesantren, <https://ditdpontren.kemendagri.go.id/halaman/sejarah>

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. d. Pendidikan tinggi; pendidikan formal pada pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. (2) Lembaga pendidikan nonformal, terdiri dari: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis ta'lim, dan satuan pendidikan yang sejenis. (3) Lembaga pendidikan informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. (4) Lembaga pendidikan keagamaan, a. pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli agama. c. pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. d. pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan atau bentuk lain yang sejenis.¹⁸

Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen. kemudian kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional.

Posisi pendidikan Islam didalam system pendidikan nasional yaitu: pendidikan sebagai lembaga (formal, nonformal, informal, usia dini, keagamaan), pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di Sekolah dan nilai-nilai islami juga terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang dibentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya tentu ada hambatan. Hambatan dan tantangan di masa lalu, antara lain keterbatasan dana, belum adanya perencanaan yang terarah, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah globalisasi dan pergeseran masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri, yang mengakibatkan parubahan cara berpikir, cara bicara, dan cara kerja.¹⁹

¹⁸ Munawar, I. (2023). Pendidikan Islam dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. Bahan Kuliah pada Mata Kuliah Pengembangan Teori dan Praktik Manajemen Pendidikan Islam Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹⁹ Muh. Wasith Achadi, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, jurnal al-ghazali, vol 01, no02, 2018, 166

Perkembangan dan pembaruan pemikiran pendidikan islam dan moderasi beragama

Pembaharuan atau modernisasi yang mengandung pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang timbul oleh tujuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Modernisasi atau pembaharuan juga berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas mental sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masyarakat kini. Dimulainya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yaitu dari tahun 1931 dimana lembaga pendidikan Islam Indonesia memasuki warna baru. Modernisasi pendidikan Islam Indonesia dirintis oleh para alumni-alumni yang belajar di negara-negara Timur Tengah khususnya Mekkah. Pengaruh pendidikan modern sangat mendapat respons positif, karena banyak lembaga pendidikan yang menganut sistem modern seperti Kulliah Mu'allimin Islamiyyah yang berdiri pada tahun 1931 Pimpinan Mahmud Yunus. Selain itu Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo pimpinan KH. Imam Zarkasyi sudah mengikuti kurikulum dan sistem pendidikan normal sebelumnya masih secara tradisional. Sistem Pendidikan Islam pada mulanya diadakan di surau-surau dengan tidak berkelas-kelas dan tiada pula memakai bangku, meja, dan papan tulis, hanya duduk bersela saja. Kemudian mulailah perubahan sedikit demi sedikit sampai sekarang. Pendidikan Islam yang mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis, ialah Sekolah Adabiah (Adabiah School) di Padang.²⁰

Moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang menjejakkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi dan ukhuwah dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan Lil alamin. Moderasi Islam adalah solusi bagi dua kutub pemikiran Islam yang keras, tidak menerima perbedaan dan ijtihad seperti aliran pemikiran Ad-Zahiriyyah, dimana pemikiran ini punah karena sifat dan karakternya yang keras dan tidak toleran. Moderasi Islam juga solusi bagi pemikiran yang mengandalkan logika secara absolut dan mutlak, cenderung membolehkan apa yang dilarang syari'at yang bersifat qath'I dan Ijma'. Umat Islam dunia membutuhkan pemikiran moderat dalam mendakwahkan Islam, dan dalam berinteraksi dengan dunia lainnya agar terwujud kehidupan dunia yang aman, toleran dan saling menolong.²¹

Sikap moderat dapat tercermin dalam karakter sebagai berikut; 1) penyebaran ajaran Islam melalui ideologi non kekerasan, 2) mengadopsi cara hidup modern dengan segala derivasinya, termasuk teknologi, demokrasi, HAM, dan sejenisnya, 3) penggunaan cara berpikir rasional, 4) memahami Islam dengan pendekatan kontekstual, dan 5) penggunaan ijtihad dalam mencari solusi terhadap persoalan yang tidak ditemukan justifikasinya dalam al-Quran dan hadits. Untuk menopang konsep dan sikap moderat, setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dikembangkan dan diinternalisasikan melalui proses pendidikan. Keempat nilai dasar

²⁰ Saihu, Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 3, No 1, 2015,23

²¹ Khairan Muhammad Arif , Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 19, No. 2, Februari 2020, 340

tersebut ialah toleransi (tasamuh), keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazzun), dan persamaan. Semakin masifnya penyebaran gerakan-gerakan radikal dalam beragama menjadi tantangan nyata bagi umat Islam di Indonesia yang secara sosio kultural memiliki paham Islam moderat. Dalam konteks pendidikan, tentu mejadi tugas bersama untuk membendung radikalisasi agama (Islam) yang terjadi di Lembaga pendidikan sekaligus menyebarkan nilai moderasi Islam yang sesuai dengan karakter Islam Indonesia kepada para peserta didik. Ada tiga tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga tantangan ini membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera diselesaikan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek, sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek.²²

KESIMPULAN

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak kedatangan Islam ke kepulauan Nusantara pada abad ke-13. Pendidikan Islam pertama kali diperkenalkan melalui perdagangan dan perkawinan antara pedagang Islam dengan masyarakat setempat. Kemudian, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah mulai muncul sebagai pusat-pusat pembelajaran agama Islam. Terdapat 5 Teori tentang masuknya Islam di Indonesia: Teori Mekah, Teori Gujarat, Teori Persia, Teori Cina.

Islam di Indonesia juga berkembang seiring dengan sistem pendidikan nasional. Dalam upaya menyelaraskan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa-siswa Muslim dan non-Muslim dapat memahami nilai-nilai agama Islam sebagai bagian dari pendidikan mereka. Pendidikan islam di indonesia melalui 6 masa: Masa kerajaan islam, Masa pemerintah belanda, Masa pemerintah Jepang, Pendidikan Pada Masa Orde Lama, Pendidikan Pada Masa Orde Baru, Pendidikan Islam di Zaman Reformasi.

Perkembangan dan pembaruan (modernisasi) pemikiran pendidikan Islam telah menjadi salah satu fokus penting dalam konteks pendidikan di Indonesia. Gerakan modernisasi pendidikan Islam telah menciptakan perubahan signifikan dalam metode pengajaran, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan Islam. Dengan adanya teknologi modern, akses ke sumber daya pendidikan Islam telah semakin mudah, membantu siswa dan guru untuk memahami agama Islam dengan lebih baik.

Masyarakat Indonesia juga semakin memahami pentingnya moderasi beragama. Gerakan moderasi beragama telah muncul sebagai tanggapan terhadap

²²Bayu Alif Ahmad Yasin Hanifatulloh, Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan, *Tsamratul Fikri* | Vol. 14, No. 2, 2020, 148

ekstremisme agama, dan berupaya mempromosikan toleransi, dialog antar-agama, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif pendidikan Islam yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, Muh. Wasith, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, jurnal al-ghazali, vol 01, no02, 2018
- Afiani AZ, dkk. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 9 (1) 2021
- Arif, Khairan Muhammad, Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 19, No. 2, Februari 2020
- Arief Firmansyah, & Amirudin. (2023). Understanding and History of the Development of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 1(2), 81–91. <https://doi.org/10.61166/fadlan.v1i2.36>
- Fahmi, Fauzi, and Firmansyah Firmansyah. "Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1 (2021)
- Hanifatulloh, Bayu Alif Ahmad Yasin, Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan, Tsamratul Fikri | Vol. 14, No. 2, 2020
- Lutfiyana, Izza, Ridwan Ardianto, and Fery Diantoro. "Tinjauan Histori Terhadap Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan* 7.2 (2021)
- Moch. Salman Alfarizi, & Khozin. (2024). Holistic Curriculum Development in Islamic Education Institutions in Vocational Schools. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.58355/lectures.v3i1.79>
- Munawar, I. Pendidikan Islam dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. Bahan Kuliah pada Mata Kuliah Pengembangan Teori dan Praktik Manajemen Pendidikan Islam Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta (2023)
- Nasution, Fauziah, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 11, no. 1 (2020)
- Nur Afiah. (2023). Base and The Goals of Islamic Religious Education In Indonesia. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v2i2.43>
- Saihu, Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 3, No 1, 2015
- Saputra, Fedry, sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di indonesia Jurnal AL-HIKMAH Vol 3, No 1 (2021)
- Saputra, Fedry. "Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di indonesia." *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3.1 (2021)

Ulya, Vita Fitriatul, pendidikan islam di indonesia: problem masa kini dan perspektif masa depan, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 2, September 2018

Yusri M. Daud Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry Vol. 10 No.2, Edisi Juli-Desember 2021